

# Indeks Kepatuhan dalam Pengawasan Koperasi

**B**EBERAPA waktu belakangan kerap diberitakan koperasi yang mulai miring-miring (tidak taat/tidak disiplin) dan bahkan telah ada yang bermasalah, berdampak merugikan koperasi dan anggotanya serta para pihak terkaitnya. Terpikir kemudian bagaimana jika koperasi bermasalah itu terus bertambah, tentu menjadi beban yang tidak ringan, bukan saja bagi pelaku dan pembina koperasi, tetapi juga bagi perekonomian. Jangan dilupakan pula bahwa isu tersebut bisa menjadi pemicu kampanye hitam terhadap koperasi.

Koperasi yang tidak taat dan tidak disiplin itu sebagai cerminan koperasi yang tidak patuh sehingga patut untuk ditingkatkan pengawasannya. Oleh karena itu, agar tepat arah dalam prioritas penegakan kepatuhan, seyogianya ada upaya pencegahan dini (*early warning*) melalui penelusuran indeks kepatuhan koperasi.

## Pilar kepatuhan

Koperasi Indonesia sebagai orga-

nisasi sosio-ekonomi bertumpu pada keswadayaan yang terbuka untuk tumbuh dalam skala luas dengan menawarkan pelayanan yang layak dalam merespons kebutuhan anggotanya. Dalam praktik koperasi tersebut, ada pilar-pilar pengaturan internal koperasi dan kelaziman industri atau komunitas yang perlu dipatuhi seperti mengenai definisi, nilai, dan prinsip koperasi. Ada pula regulasi pemerintah yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Jadi dalam penyelenggaraannya koperasi sepatutnya patuh terhadap: pertama, ketentuan yang mengharuskan untuk ditaati setiap koperasi, seperti nilai prinsip dan asas sebagai jati diri koperasi. Kedua, ketentuan yang membolehkan, gunakan standar yang menjadi acuan kinerja. Misalnya dalam menghimpun dana untuk pembiayaan usaha perlu diperhatikan rasio-rasio keuangan seperti struktur pendanaan yang sehat, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan mengembalikan.



**Suwandi**

Dosen Universitas Bakrie  
Anggota Majelis Pakar Dekopin

Ketiga, tidak berbuat apa yang tidak diperbolehkan. Melakukan agar tidak melanggar, seperti dalam menempatkan calon anggota. Bila persyaratan sebagai anggota telah dapat dipenuhi tiga bulan sesudahnya segera dikukuhkan menjadi anggota, dan seterusnya. Keempat, hal dinamis yang memerlukan penafsiran, agar mengikuti acuan yang dianjurkan oleh otoritas/atau regulator yaitu pemerintah, seperti acuan tentang skala ekonomis pelayanan koperasi, transaksi anggota dan nonanggota khususnya bagi koperasi di sektor riil, dan lainnya.

Koperasi Indonesia, selain perlu maju tumbuh, berkembang, dan berdampak luas bagi anggota, im-

plementasinya juga sangat perlu dengan menegakkan kepatuhan dari pilar-pilar pengawasan, yaitu jati diri koperasi dan regulasi di bidang kelembagaan dan fungsi-fungsi manajemen usaha serta tata kelola yang baik (*good governance*).

## Indeks kepatuhan

Kepatuhan koperasi mencerminkan perilaku koperasi yang sesuai dengan norma, jati diri, dan peraturan secara disiplin. Indeks kepatuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa tinggi/besar kepatuhan koperasi terhadap norma, jati diri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang perkoperasian.

Indeks kepatuhan tersebut dapat diukur secara periodik (tahunan) dari tiap parameter dan indikatornya, seperti prinsip koperasi, kelembagaan, usaha, keuangan, dan transaksi koperasi.

Hasil pengukuran indeks akan menghasilkan level kepatuhan koperasi pada suatu periode (tertentu) dan rekomendasi parameter serta indikator kepatuhan yang perlu mendapatkan perhatian, dibina baik untuk ditingkatkan ataupun untuk dikurangi ataupun ditiadakan. Sehingga dapat dicapainya koperasi yang tumbuh kelembagaan dan usahanya, sehat keuangannya, benar transaksinya, juga sejalan (*in line*) dengan norma jati diri koperasi. Semakin banyak koperasi yang terindeks mendekati atau melebihi indeks dasarnya, dapat menjadi sinyal awal perlu tidaknya intensifikasi pengawasan lanjutan, pembinaan, dan penenaan sanksi yang tepat.

Selanjutnya, apa yang perlu ada dan dilakukan ke depan? Pertama tentu saja melembagakan kepatuh-

an dalam perasi, m koperasi melaksan tuhan. Sel tepat pele gai bagian rus koper fungsi tug di, perlu ngani kep bagian da koperasi.

Kedua, tihan, dan peningkat terampil rasi, yaitu unit yang patuhan k dan pelati koperasi daerah, s berperan fikasi dan patuhan. kepatuha Hari Kope

Indeks kepatuhan tersebut dapat diukur secara periodik (tahunan) dari tiap parameter dan indikatornya, seperti prinsip koperasi, kelembagaan, usaha, keuangan, dan transaksi koperasi.

Hasil pengukuran indeks akan menghasilkan level kepatuhan koperasi pada suatu periode (tertentu) dan rekomendasi parameter serta indikator kepatuhan yang perlu mendapatkan perhatian, dibina baik untuk ditingkatkan ataupun untuk dikurangi ataupun ditiadakan. Sehingga dapat dicapainya koperasi yang tumbuh kelembagaan dan usahanya, sehat keuangannya, benar transaksinya, juga sejalan (*in line*) dengan norma jati diri koperasi. Semakin banyak koperasi yang terindeks mendekati atau melebihi indeks dasarnya, dapat menjadi sinyal awal perlu tidaknya intensifikasi pengawasan lanjutan, pembinaan, dan penerapan sanksi yang tepat.

Selanjutnya, apa yang perlu ada dan dilakukan ke depan? Pertama tentu saja melembagakan kepatuh-

an dalam instrumentasi kerja koperasi, memfungsikan pengawas koperasi saja tidak cukup untuk melaksanakan fungsi tugas kepatuhan. Sebab pada praktiknya lebih tepat pelembagaan kepatuhan sebagai bagian dari fungsi tugas pengurus koperasi, bukan menambahkan fungsi tugas pengawas koperasi. Jadi, perlu ada bagian yang menangani kepatuhan koperasi sebagai bagian dari fungsi tugas pengurus koperasi.

Kedua, fasilitas, konsultasi, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan serta keterampilan teknis pengelola koperasi, yaitu pengurus, manajer, atau unit yang berfungsi di bidang kepatuhan koperasi. Juga pendidikan dan pelatihan mengenai kepatuhan koperasi kepada para pembina di daerah, sebab mereka pun akan berperan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran indeks kepatuhan. Ketiga, *update* instrumen kepatuhan dan sosialisasi. Selamat Hari Koperasi, 12 Juli 2017.\*\*\*